

# WALHI Giring Warga Pesisir Selatan Datangi Dewan

## Molor, Dewan Pun Dibuat Menunggu

**BANTUL** – Tak puas menggelar dialog di Pemda Bantul beberapa waktu lalu, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DIY Kamis (16/11) kemarin memboyong beberapa warga pesisir Selatan mendatangi DPRD Bantul. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan berkaitan dengan pengelolaan lahan pantai.

Wahyudi selaku pimpinan rombongan menyebutkan, beberapa tuntutan warga pantai Selatan di antaranya adalah pengembangan kawasan pesisir Selatan Bantul harus melibatkan masyarakat. Selain itu mereka meminta agar kawasan pesisir Selatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian lahan kering dan sebagai kawasan penghijauan pantai (*wind barrier*) berupa konservasi hutan lindung. “Untuk melindungi fungsi dan kemampuan daya dukung lingkungan pantai dan laut,” terang Wahyudi.

Dalam pernyataan sikapnya, warga pun menyoroti bertambahnya pemukiman liar di sepanjang pesisir Selatan, kurangnya perlindungan hukum bagi kawasan pemukiman rakyat dan transparansi beberapa proyek, termasuk kasus PT Awani. “Masyarakat dan lingkungan hidup tidak boleh dirugikan oleh kepentingan industri dengan alasan dan tujuan apapun,” tegas Wahyudi.

Hal lain yang terlontar adalah desakan untuk segera ditegaskan mengenai status hukum dan batas-batas kepemilikan tanah kasultanan (Sultan Ground), tanah negara dan tanah masyarakat. “Hak garap lahan pantai untuk pertanian lahan kering agar dilindungi oleh hukum yang berlaku,” lanjut Wahyudi.

Senada dengan itu, Sudigdo warga Patihan Sanden meminta kejelasan status hukum atas tanah garap mereka. “Kejelasan hukum ini agar tanah garapan kami bisa menjadi ketentraman,” kata

Sudigdo polos.

Kepada anggota dewan, salah seorang warga Sanden lainnya juga mengeluhkan status tanah yang sering ‘merepotkan’ itu. “Kalau ada pembangunan dari pemda dan masyarakat menolak, terus ditanya *lha lemahe sopo*. Terus ditanya surat tanahnya mana. Ini memojokkan kami,” keluhnya.

Menurut warga Patihan Sanden ini, mereka menggarap lahan yang dikatakan Sultan Ground itu telah bertahun-tahun. “Bahkan sejak nenek moyang kami,” terangnya. Ia pun meminta pada setiap pembangunan menyertakan masyarakat. “Jadi jangan hanya dijadikan penonton,” katanya.

Menanggapi tuntutan warga tersebut, Ketua DPRD Bantul Agus Wiyarto menyatakan akan mencermatinya. Ia pun berharap agar WALHI DIY tidak hanya peduli dengan kawasan pesisir pantai Selatan. “Sebagai LSM yang bergerak di bidang lingkungan, saya berharap WALHI juga memperhatikan aspek lingkungan lain,” kata Agus sambil menyebutkan, masalah limbah dan sampah pun layak menjadi perhatian WALHI DIY.

Sebelumnya anggota dewan sempat dibuat menunggu. Karena waktu yang dijanjikan jam 10.00 ternyata molor hingga 1 jam. Karena padatnya agenda, warga hanya ditemui beberapa anggota dewan dan unsur pimpinan.

Dialog tersebut diawali dengan *happening art* dari Aliansi Seni Untuk Alam. Berdua mereka berjalan menuju gedung DPRD dan menapaki besek-besek berisi tanah yang tertata hingga lobi DPRD.

Di dalam besek itu terpasang lembar fotokopi sertifikat tanah. Mereka menggambarkan pergulatan antarwarga dalam memperebutkan tanah di pesisir Selatan. Pada sebuah tonggak batu yang mirip dengan pembatas tanah, mereka menuliskan “Tanah Ini Dilindungi Tuhan”.

Puncak *happening art* untuk mendukung perlindungan tanah kawasan pesisir Pantai Selatan ini ditandai dengan penyerahan tonggak batu itu pada Ketua DPRD Bantul Agus Wiyarto. (uni)





SITI BARUNYADJIA

**Happening art Aliansi Seni Untuk Alam yang ikut mengisi aksi ke DPRD Bantul, kemarin.**